



Morality, Intellectuality, and Entrepreneurship
um surabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



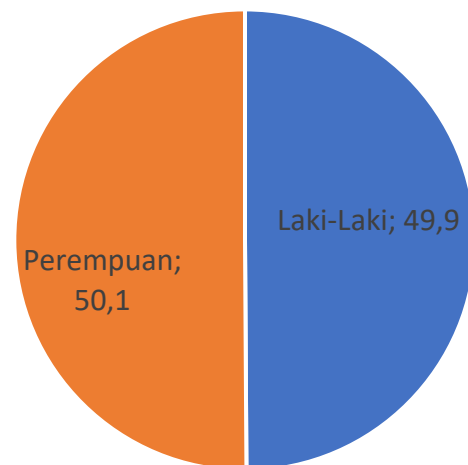
umsurabaya www.um-surabaya.ac.id @umsurabaya umsbv 0858-5244-6337

Membaca Dinamika Politik-Demokrasi di Jawa Timur: Proyeksi dan Tantangan Pada Pemilu 2024

Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Pusat Studi Anti-Korupsi & Demokrasi (PUSAD) UMSurabaya
satriaunggulwp@um-Surabaya.ac.id
Kelas Politik PW 'Aisyiyah Jawa Timur, 28 September 2023

Proporsi Pemilih Jatim Pemilu 2024 Laki-laki dan Wanita

Jenis Kelamin



■ Laki-Laki ■ Perempuan

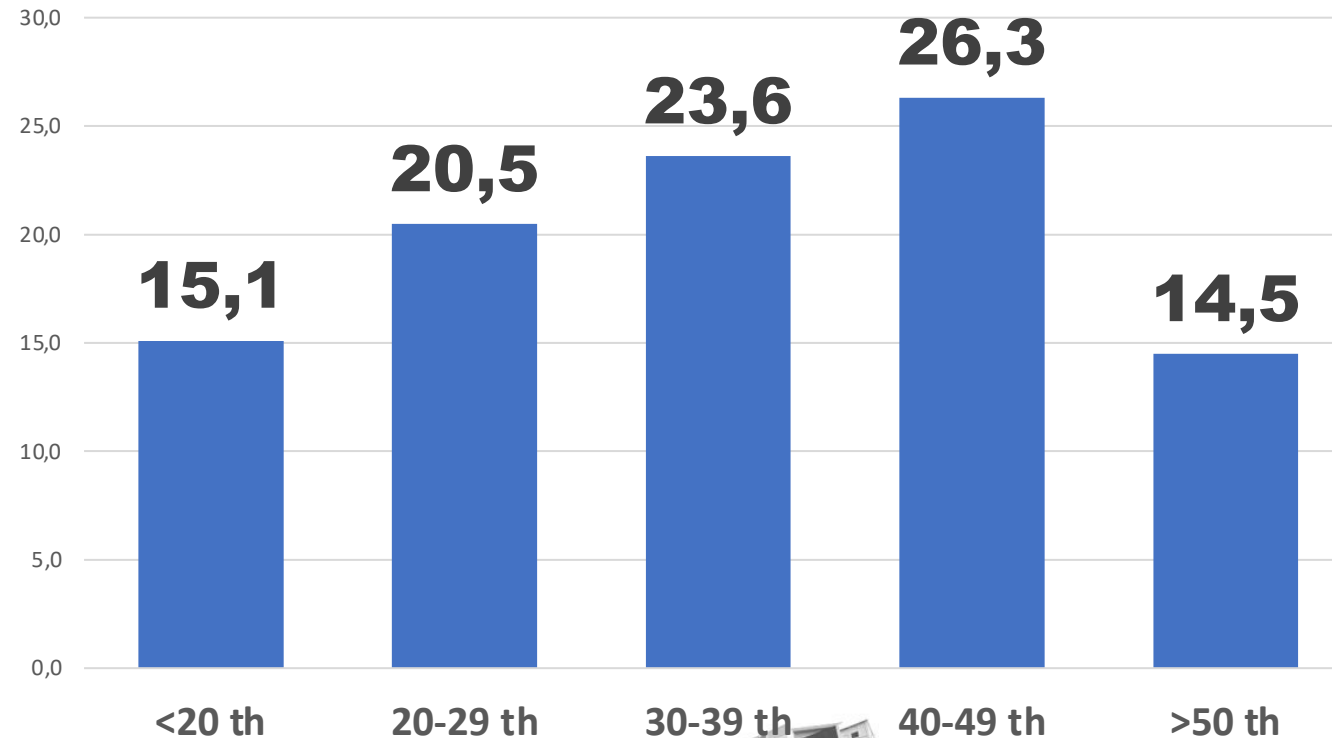


um surabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



www.um-surabaya.ac.id

Varian Usia Pemilih Jatim Pada Pemilu 2024

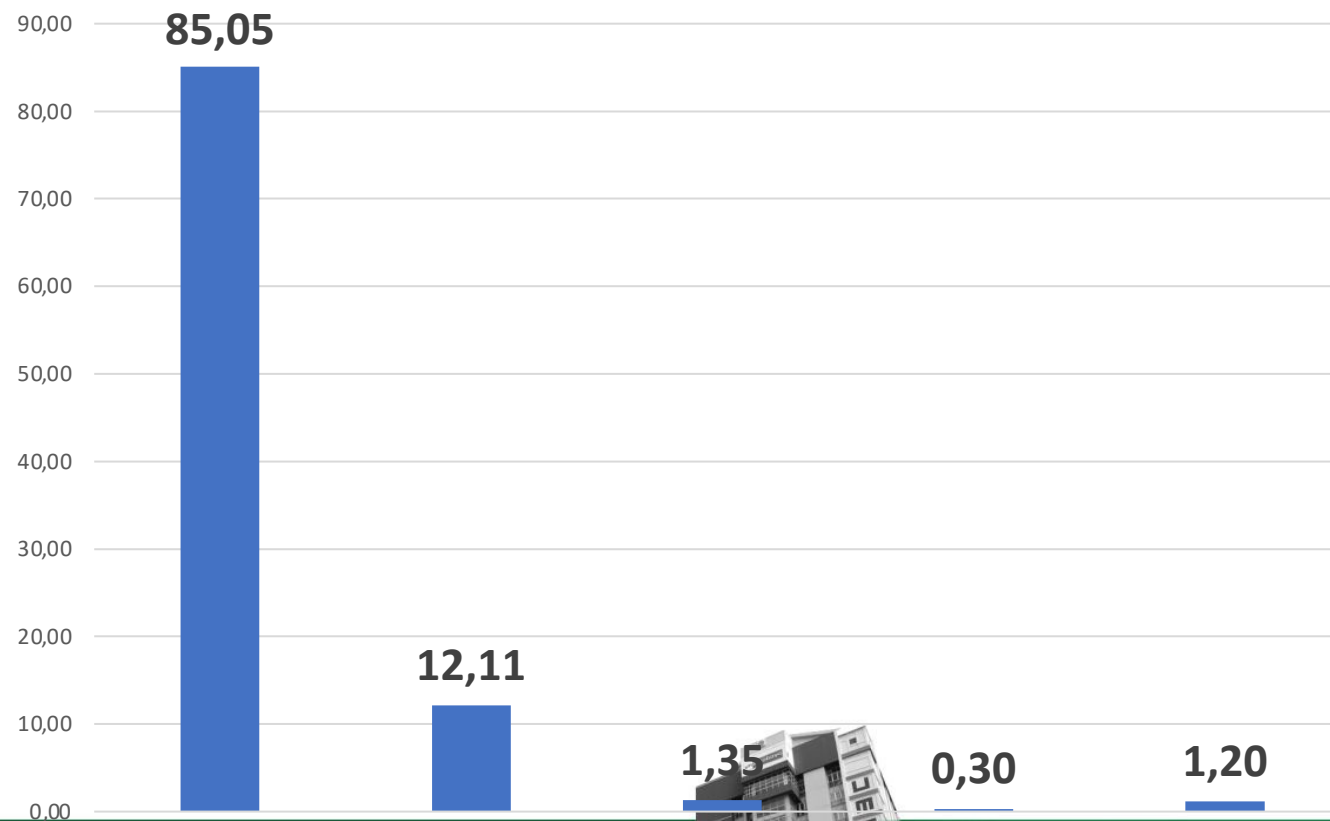


um surabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



www.um-surabaya.ac.id

Varian Suku Pemilih Jatim Pemilu 2024



um surabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Jawa

Madura

Batak

Minangkabau

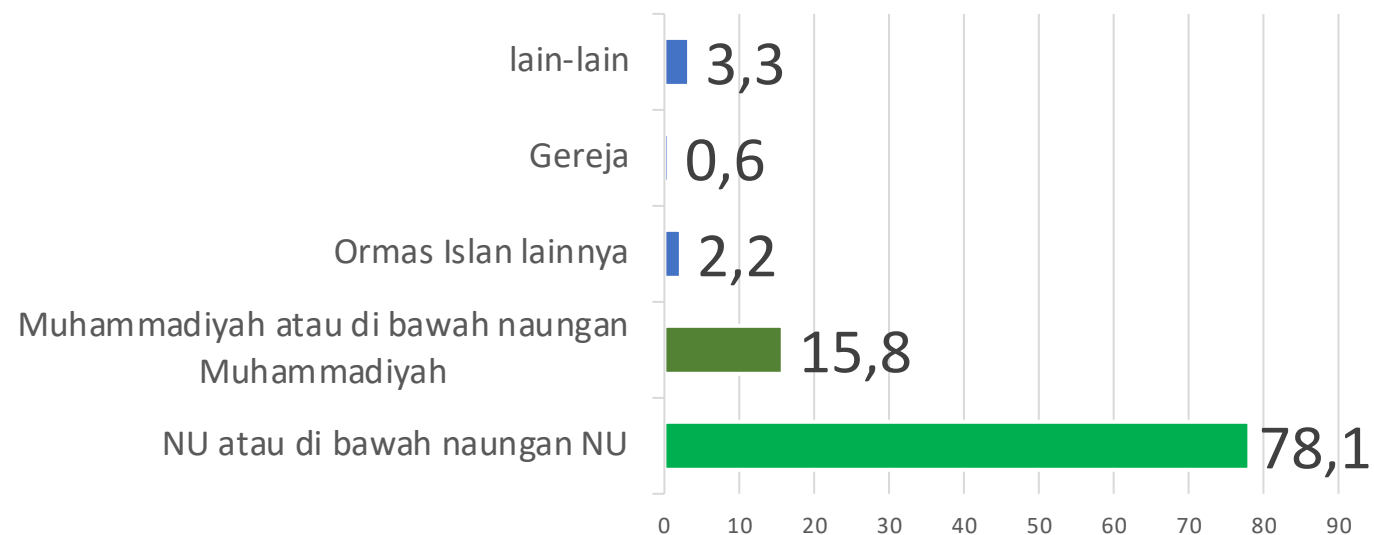
Campuran

www.um-surabaya.ac.id

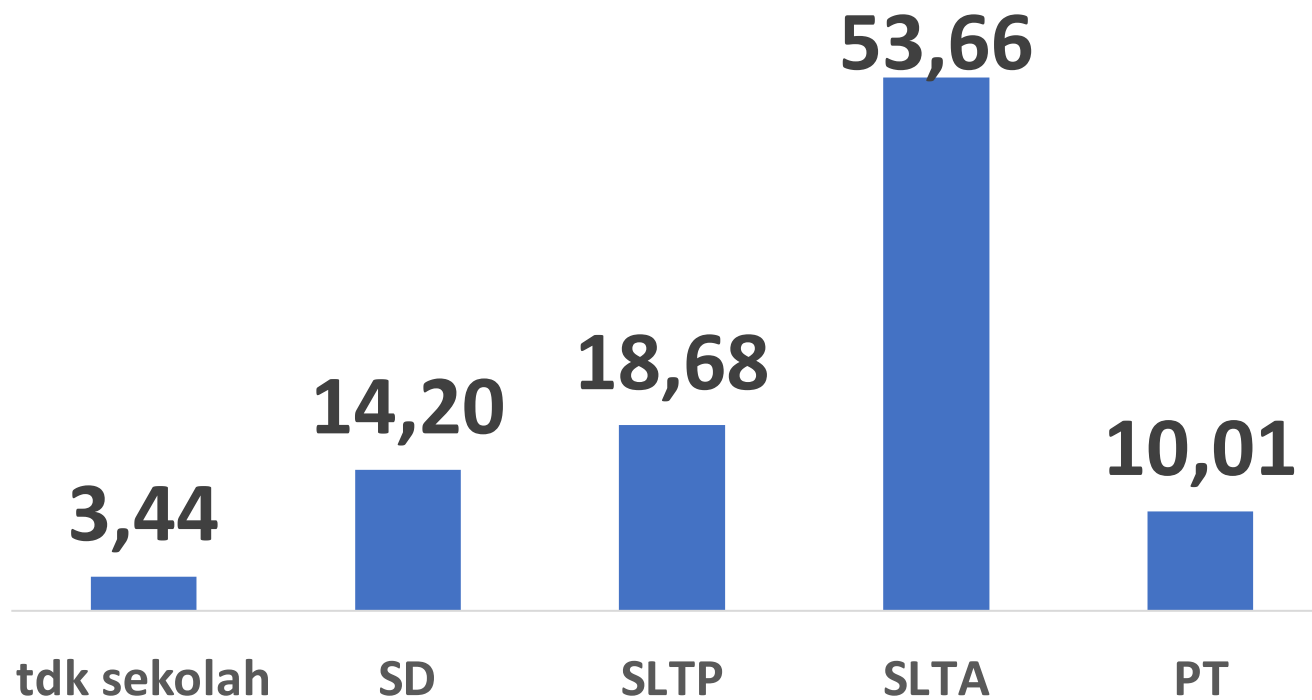
Varian Agama Pemilih Jatim Pemilu 2024



Varian Penganut Ormas Pemilih Jatim Pemilu 2024



Tingkat Pendidikan Pemilih Jatim Pemilu 2024



um surabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



www.um-surabaya.ac.id

Mengapa Jawa Timur Penting?

Jumlah DPT terbesar kedua di Indonesia

- Setelah Jawa Barat, dengan DPT sejumlah 31.402.838 dinamika politik nasional ditentukan di Jawa Timur

Kultur dan karakteristik politik yang unik

- Wilayah yang amat luas berpengaruh terhadap tipologi pemilih berdasarkan tlatah (Arek, Mataraman, Tapal Kuda, Madura)

Basis pemilih Muslim

- Dengan jumlah pemilih beragama Islam 93,9% dengan proporsi Ormas NU 78,1, Muhammadiyah 15,8% , banyak beranggapan Jatim adalah “ladang suara” pada saat yang sama potensi dan tantangan akan muncul



Potensi konflik Pada Pemilu 2024 di Jatim

Konflik yang didorong oleh fatwa/seruan atas nama agama
Bagaimana institusi keagamaan merekomendasi pada pilihan politik berupa fatwa dan seruan politik yang kemudian akan berdampak pada gesekan politik di akar rumput.

Faktor yang mendorong potensi konflik terkait dengan Penyalahgunaan Perizinan
sangat erat kaitannya dengan kekuatan legitimasi pemerintahan lokal untuk memberikan izin untuk eksplorasi dan eksploitasi SDA sebagai bagian dari konsesi politik dan akan berdampak pada kooptasi masyarakat

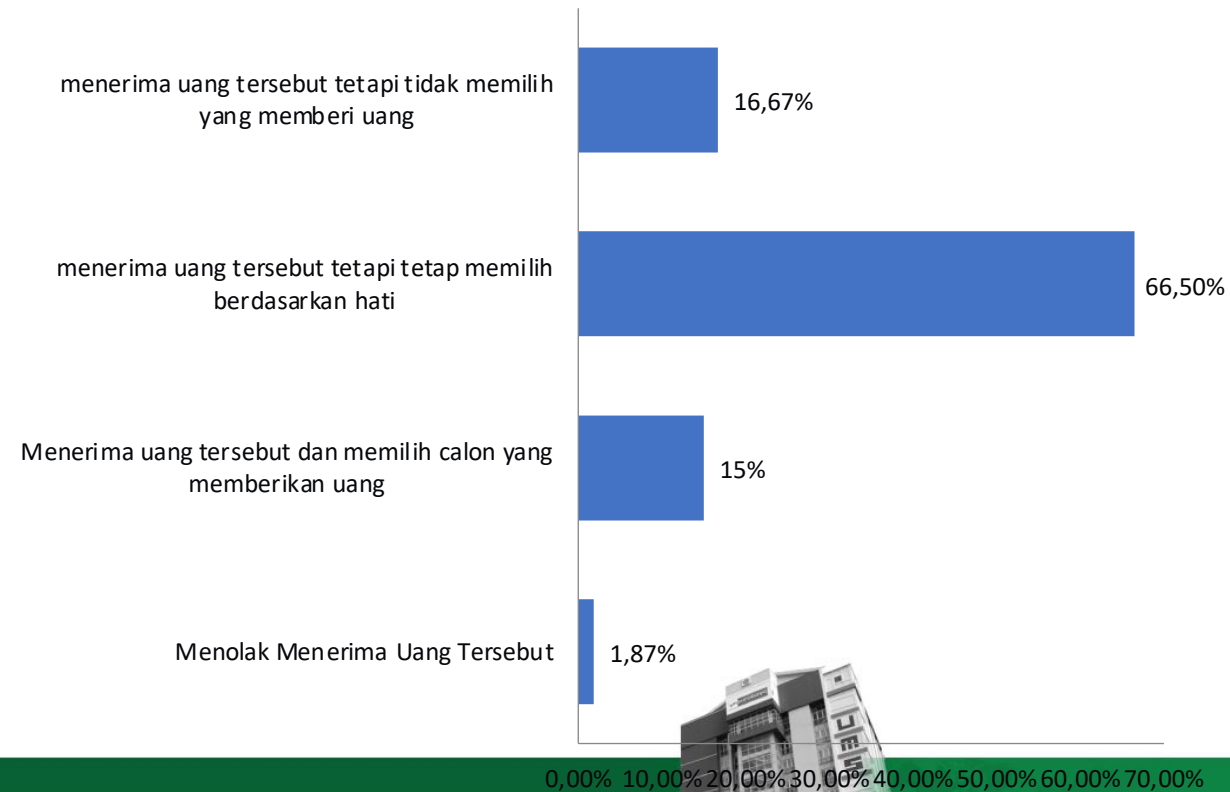
Isu Hoax dan Black Campaign
dengan semakin deterministiknya media sosial menyebabkan preferensi politik sangat terpengaruhi isu Hoax dan Black Campaign yang akan menimbulkan potensi konflik

Isu SARA
Penggunaan sentimen asli kedaerahaan (suku dan Ras) untuk tujuan mendulang suara dan membelah suara pemilih. Dan politik identitas sangat kental di masyarakat Jaawa Timur

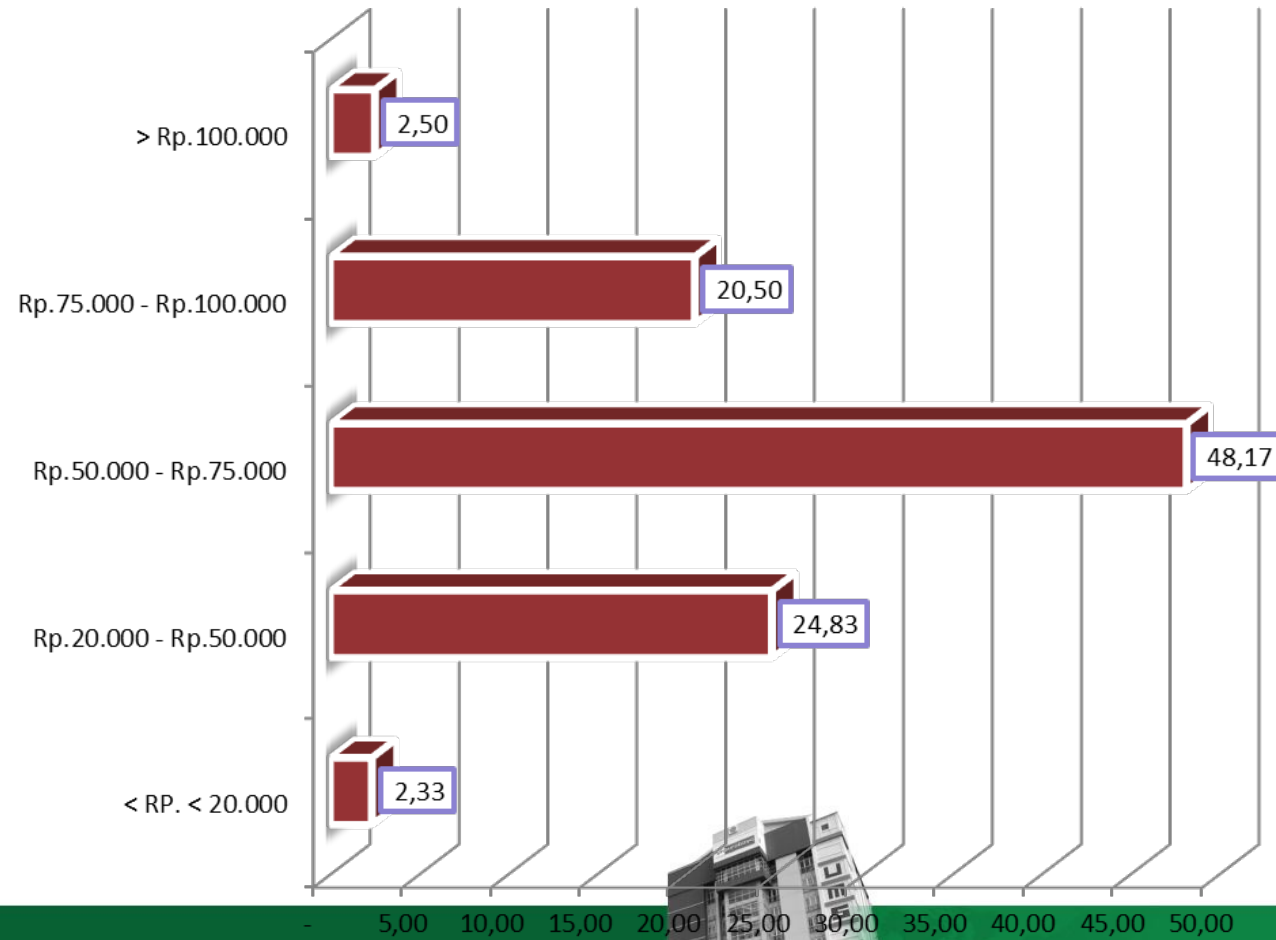
Netralitas ASN dalam penggunaan kewenangan
dengan dalih bansos, pembangunan infrastruktur, dsb yang disebar di berbagai macam organisasi dan kelompok masyarakat memiliki tujuan politik, membuat potensi konflik semakin besar



Potensi Politik Uang Pada Pemilu 2024 SIKAP APABILA DIBERI UANG



BESAR UANG YANG DIHARAPKAN



Persepsi Masyarakat terhadap Politik Uang pada Pemilu 2024

1. Politik uang menjadi problematika serius menuju Pemilu 2024
2. Dengan berbagai macam jenis dan sebutan (shodaqoh politik, serangan fajar, dsb) elektoral akan ditentukan dengan sangat presisi oleh masing-masing pasangan calon
3. Metode kampanye tatap muka dan pengerahan massa sebagai momentum yang tepat dalam memberikan Politik Uang kepada elektoral
4. Selain Politik Uang yang dilakukan secara konvensional, terdapat model Politik Uang dalam bentuk penyaluran bantuan sosial dan obral perizinan yang dilakukan oleh calon petahana yang kami masih kategorikan sebagai praktik dari Politik Uang



Politik Dinasti sebagai Cikal Bakal Terjadinya Korupsi politik

- Politik Dinasti terjadi akibat proses reorganisasi kekuasaan melalui perubahan model politik baru dengan pelembagaan kekuatan pemilik modal, yang memperlihatkan oligarki kekuasaan dan berpengaruh dalam struktur sosial dan negara dalam demokrasi Indonesia (Robison and Hadiz 2004).
- korupsi terjadi karena kurangnya kontrol sosial atau gerakan sosial dari masyarakat. $C > M + D - A$ [*corruption* terjadi jika *monopoly* ditambah *discretion* tanpa *accountability*]. Karena itu perlu dilengkapi dengan kontrol sosial (*social control/SC*) sehingga menjadi: $C > M + D - A - SC$ (Klitgaard, 1998).
- Monopoli dan diskresi tanpa akuntabilitas akan menghasilkan praktik impunitas, yang terus disemai menjadi bagian penting dari hidupnya politik dinasti pada 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- Tidak adanya *social control* juga berdampak terhadap permisifnya elektoral terhadap praktik *money politics*, yang berdampak pada penggiringan suara terhadap calon kepala daerah yang dikehendaki oleh politik dinasti



Klientenisme & Politik Dinasti

Klientinisme menjadi kultur politik yang justru menjadi varian penting untuk memetakan peta politik di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

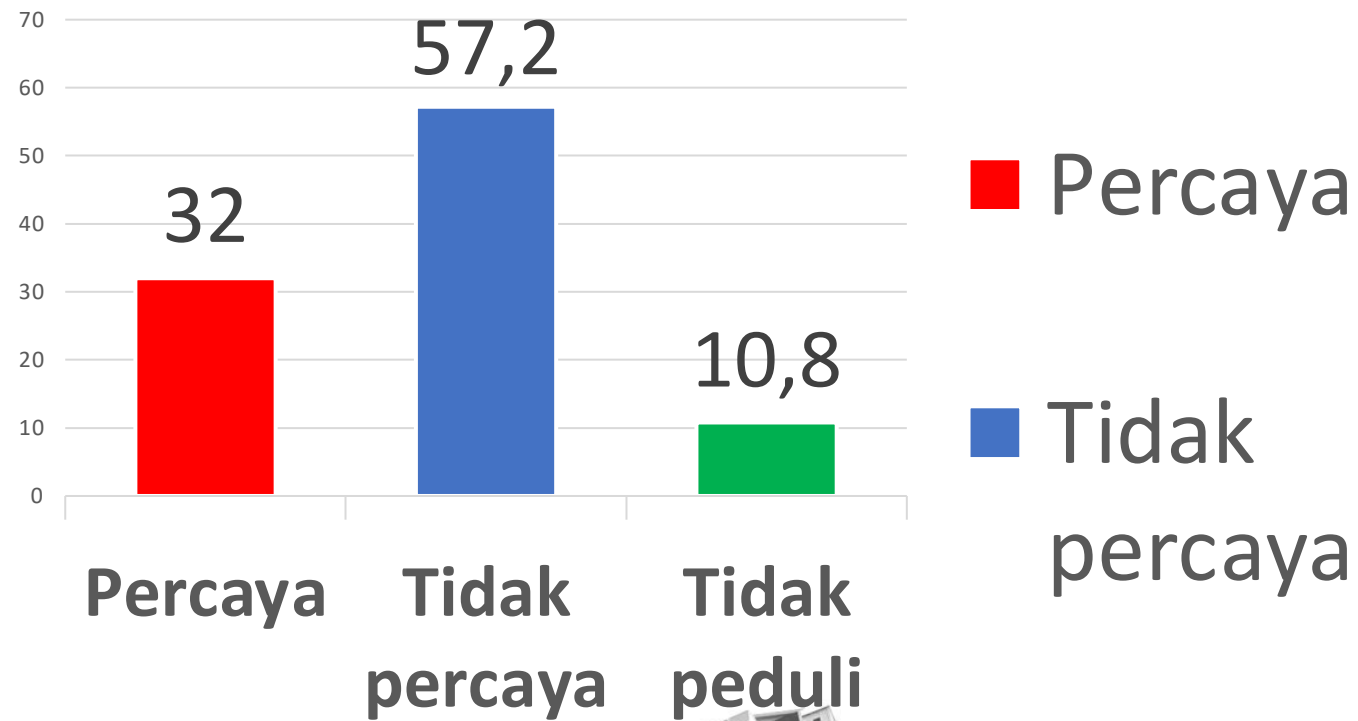
Klientinisme dan politik patronase merupakan asal mulai terjadinya politik dinasti

Klientinisme dan politik patronase bagi Edward Aspinall (Aspinall, 2019) merujuk secara khusus pada upaya tawar-menawar suara pada kontestasi Pilkada dengan peyediaan proyek/jabatan/program di pemerintahan lokal.

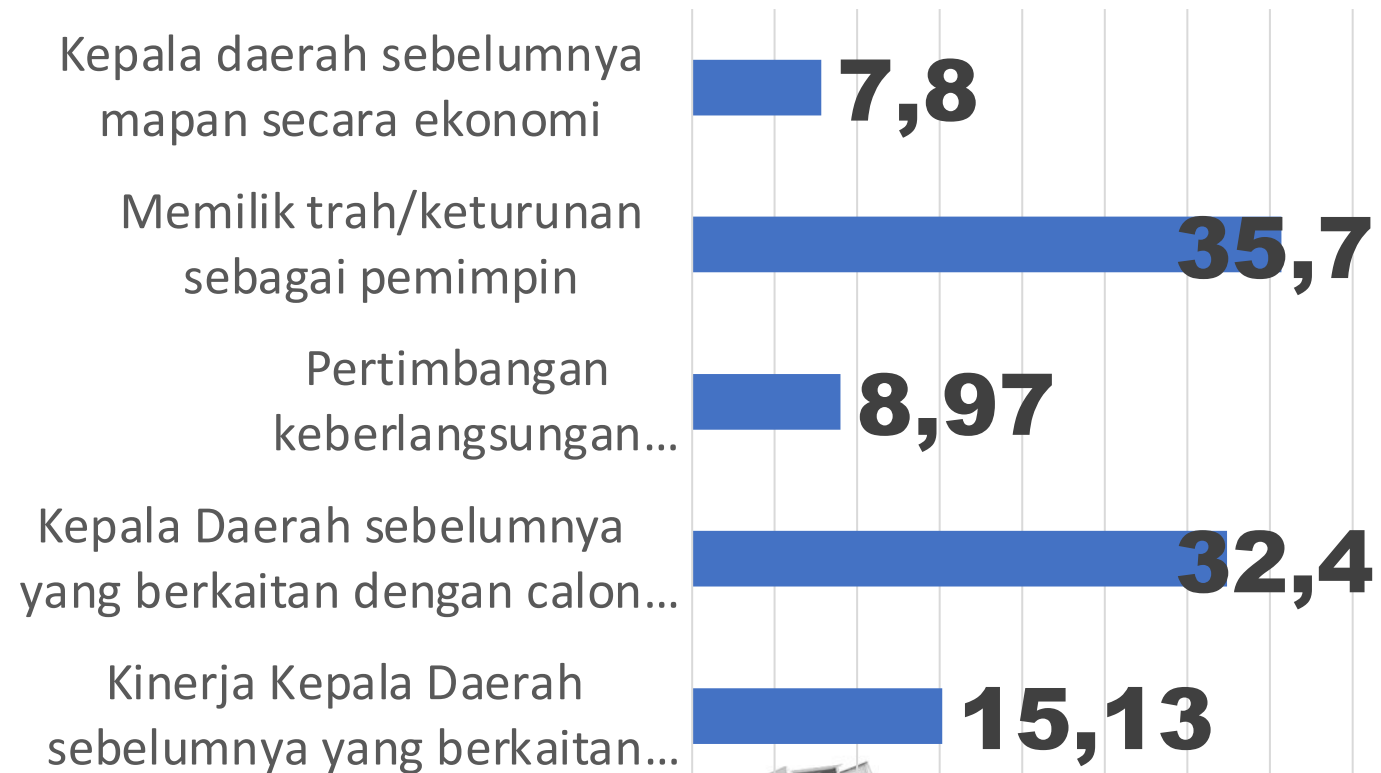
Dampaknya, berpengaruh terhadap preferensi politik masyarakat di akar rumput, dan terbukanya peluang terjadi praktik korupsi, dagang pengaruh, dsb.



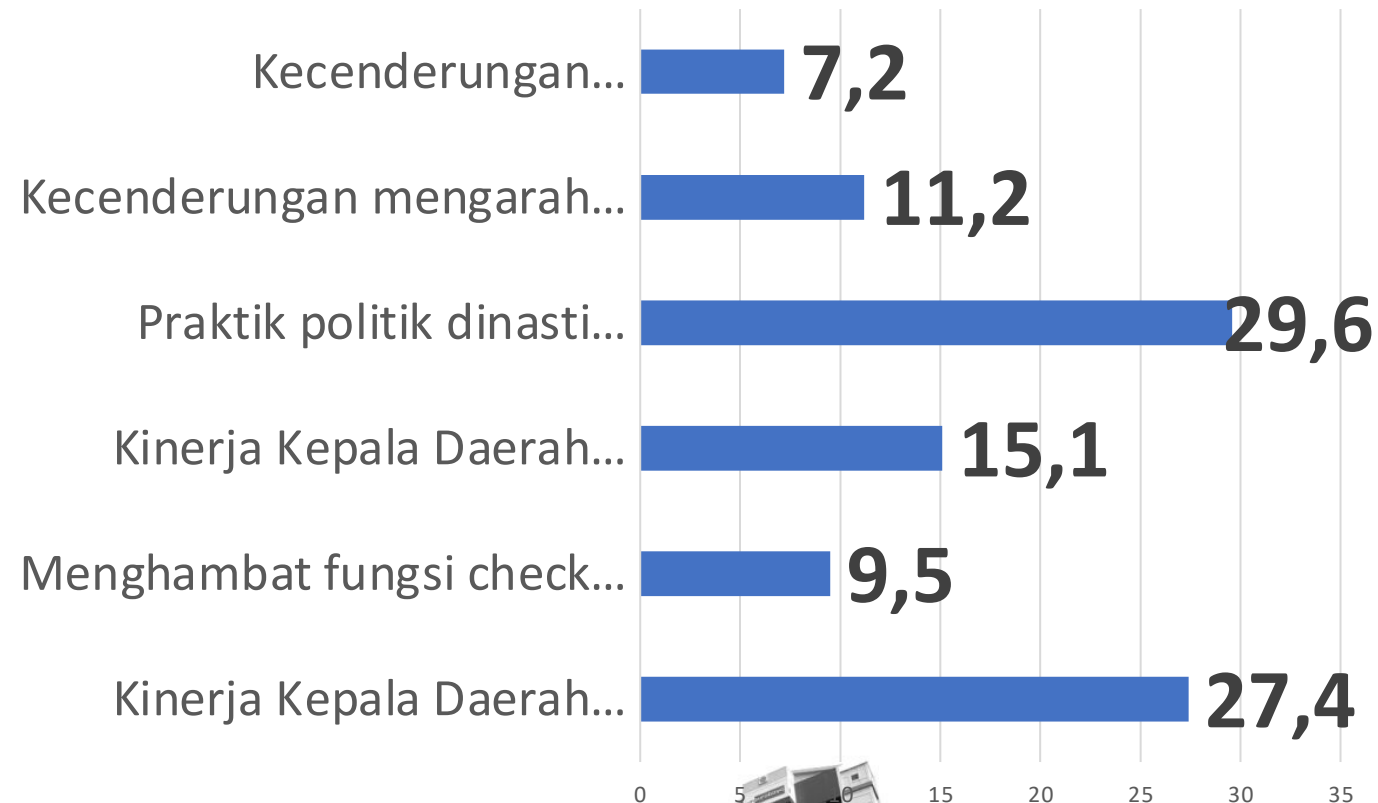
Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Calon Kepala Daerah yang memiliki hubungan (keluarga, patronase, dan hal lain sejenis)



Alasan percaya

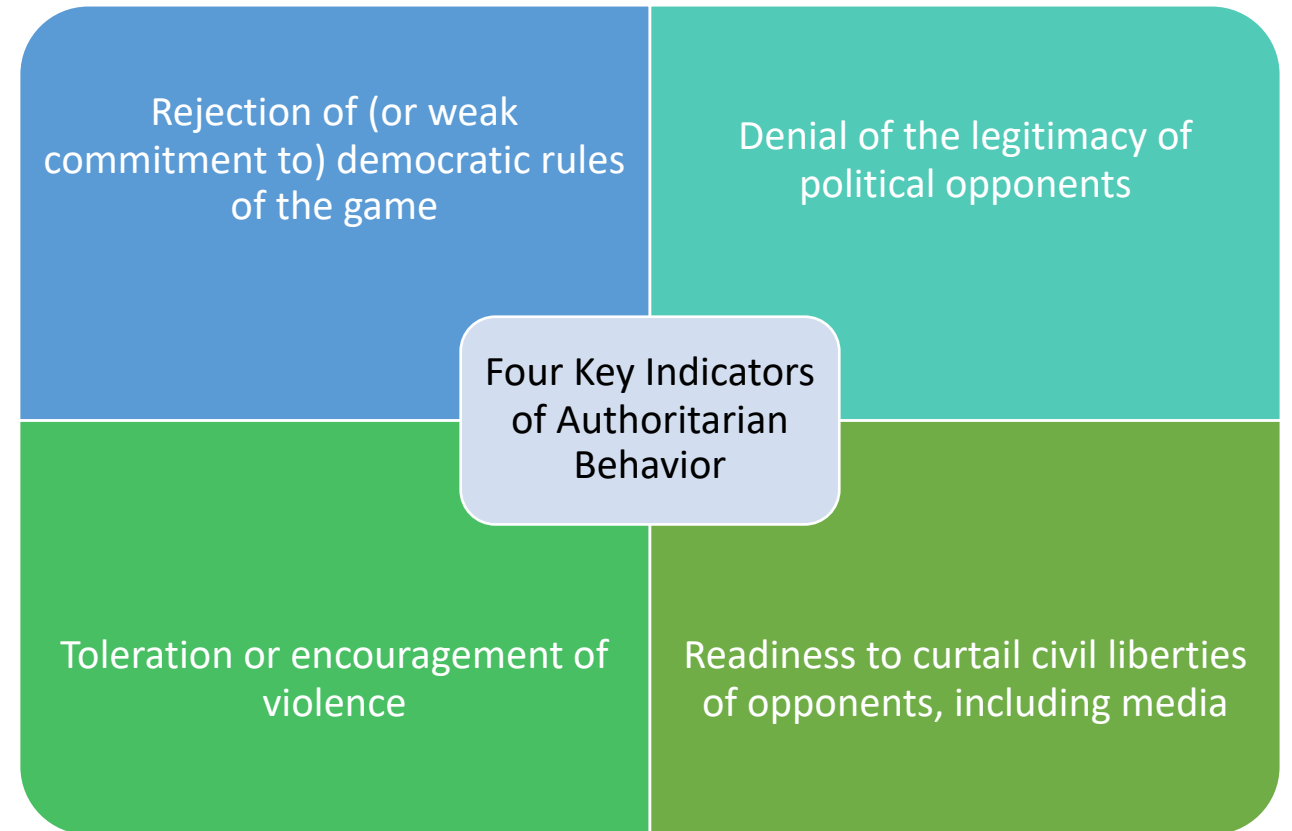
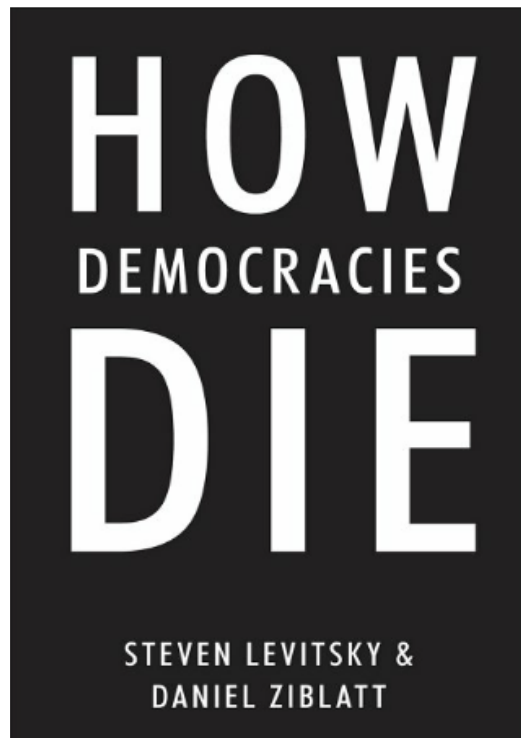


Alasan tidak percaya



How Democracy Die

Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, 2018: 18-19



um surabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



www.um-surabaya.ac.id

Makna Negara Hukum dalam Kaitannya dengan Demokrasi

Konsep negara hukum

Tidak terjebak pada penyalahgunaan kekuasaan (*machtstaat*)
Soepomo mengenalkan istilah Pembatasan kekuasaan

Dituangkan dalam perundang-undangan serta sistem ketatanegaraan Indonesia

Menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
Dipatuhi secara sungguh-sungguh oleh penguasa/ penyelenggara negara

Penguatan demokrasi

Tidak terjebak pada otoritarianisme
Menedepankan akses demokrasi dan keadilan warga negara secara luas



Potensi Korupsi Politik Menjelang-Pasca Pemilu 2024 (KPK 2023)

Abuse of Power

Pemanfaatan posisi jabatan publik untuk memperkaya diri sendiri/kroni bisnis/ dan mendukung sumber daya kekuasaan

Korupsi perizinan, korupsi PBJ

Problematika elektoral

Memfaatkan sarana-prasaraana, otoritas, akses publik, dan dana program dari negara untuk memenangkan kontestasi electoral

Vote buying, netralitas ASN, pemanfaatan otoritas inkumben

Problematika Pembuatan Kebijakan/Klientelisme

Memenangkan agenda kebijakan untuk kelompok tertentu/konstituen akibat dorongan dan dukungan selama pemilu sebagai imbalan & Jasa

Kompensasi kebijakan, mendukung kebijakan yang merugikan negara



Potensi Korupsi Sektor Politik

Political Exposure
Persons (PEP)

Politik Berbiaya Mahal

Benturan
Kepentingan

Pengadaan Barang & Jasa
(Public Procurement)

Korupsi
Sektor
Perizinan

Money Politics

Klientelisme

Public v private
corruption

Suap &
Gratifikasi

Korupsi di sektor
publik

Korupsi Sektor
SDA

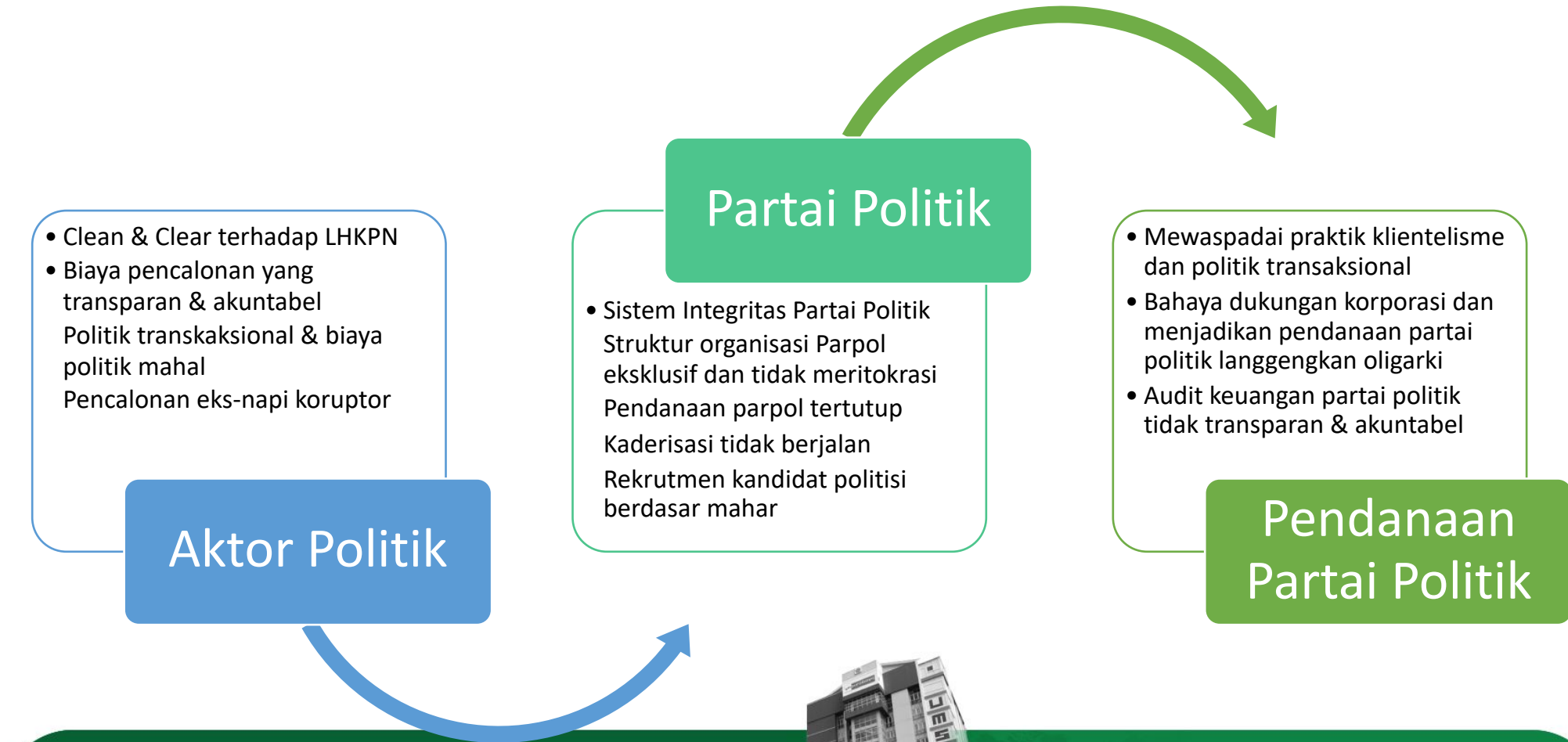
Pendanaan
Partai Politik

Transaksi oligarki

Dagang
pengaruh &
perkuat
legitimasi peran
aktor politik



Political Capture Corruption



Peran Masyarakat Sipil Menuju Pemilu 2024

Gerakkan pengawasan dan kontrol agar Pemilu 2024
luber dan jujur

partisipasi dan keterakilan perempuan amat penting
dalam melawan praktik penyelenggaraan Pemilu

Kontrol Sosial dan pendidikan sadar politik kepada
kelompok perempuan sangat penting dilakukan

Konsolidasi masyarakat sipil dalam melawan praktik
pelanggaran Pemilu 2024 di Jatim



um surabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



www.um-surabaya.ac.id

Terima **Kasih!**

Satria Unggul Wicaksana Prakasa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pusat Studi Anti-Korupsi & Demokrasi (PUSAD) UMSurabaya

satriaunggulwp@um-Surabaya.ac.id



um surabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



www.um-surabaya.ac.id